

Rabu, 23 Februari 2011

Bupati dan Walikota Tidak Menunda Hasil Pemeriksaan

Pontianak, BERKAT.

Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH meminta kepada para bupati dan walikota se Kalbar agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

“Kepada walikota dan bupati diminta untuk tidak menunda-nunda dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI mengingat amanah UU No.15 tahun 2004 pasal 20 menyatakan bahwa pejabat, wajib menindaklanjuti atas laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan tersebut,” katanya saat menyampaikan keynote speaker pada acara sosialisasi peraturan

BPK RI No 2 Tahun 2010 dan Permen-
dagri No.13 Tahun 2010 di Hotel Mer-
cure, selasa (22/2).

Tindak lanjut tersebut, tambahnya disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Gubernur, Cornelis menyambut baik terlaksanakannya sosialisasi peraturan BPK RI No 2 Tahun 2010 dan Permen-
dagri No.13 Tahun 2010.

Ia memandang kegiatan tersebut sangat urgent, karena memberikan arti penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, dengan diterbitkannya

peraturan BPK RI No.2 Tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ini, maka proses penyelesaian terhadap temuan atau rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan lebih efektif dan efisien serta memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diperiksa.

“Apakah telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan UU,” katanya. Begitu juga dengan Permen-
dagri No.13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap TLHP BPK.

“Maka pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dimaksud dapat dilaksanakan secara koordinasi melalui tim tindak lanjut yang dibentuk oleh pemda,” ujarnya. Mantan Bupati Landak ini juga

meminta agar keberadaan BPK RI jangan ditakuti

“Keberadaan BPK RI hendaknya jangan kita takuti, melainkan jadikan sebagai mitra kerja, terutama untuk share tentang permasalahan permasalahan yang dihadapi,” kata Cornelis.

Ayah dua anak ini juga berharap sosialisasi ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Provinsi Kalbar.

“Tentunya kita akan serius, bersungguh-sungguh menindaklanjuti temuan BPK RI melalui tindakan yang konkrit serta menerima dengan baik hasil pemeriksaan BPK RI. Sehingga menjadi catatan bagi kita semua, untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh tim pemeriksa BPK RI,” pungkasnya. (ipi)